

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM 4 IN 1 (*FOUR-IN-ONE*) KENDARAAN RODA EMPAT DI KAWASAN PASTEUR, KOTA BANDUNG (STUDI KASUS 2013-2014)

*“The Implementation of 4 in 1 (Four in One) System Policy 4 wheeled vehicles in Pasteur Area, Bandung (Study Case 2013-2014)”*

Alifiah Paramitha Rimardi<sup>1</sup>, Herijanto Bekt<sup>2</sup>, Mas Halimah<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran  
alifiahpr61@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (*Four in One*) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (*Four in One*) di Pasteur Kota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti *communication* (Komunikasi), *resources* (Sumber Daya), *dispositions* (Disposisi), dan *bureaucratic structure* (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (*resources*) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*), kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (*Standar Operating Procedure*) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (*Four in One*) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.

### ABSTRACT

*This Research aims to illustrate how The Implementation of 4 in 1 (Four in One) System Policy 4 wheeled vehicles in Pasteur Area, Bandung (Case Study in 2013-2014). This research is motivated by buildup of vehicles and traffic jam during the weekend in Pasteur, Bandung. The purpose of this research for to know how The implementation of 4 in 1 (Four in One) System Policy in Pasteur, Bandung to resolve the traffic jam. The author uses the theory of policy implementation of Edward III, he said that there are 4 factor such as communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. The method used in this research is descriptive qualitative method with data collection technique through literature study and field studies (observation, interview and documentation). Data validity technique is done by triangulation of source informant which obtained in field and triangulation of data technique. The results showed that the implementation of the policy of 4 in 1 (Four in One) system in Pasteur Bandung cannot be said to be successful. There is still lack of good resources to realizing the purpose of 4 in 1 (Four in One) system policy, and then lack of commitment in managing the 4 in 1 area, which lead to the weak policies being implemented, the absence of SOP (Standard Operating Procedure) resulted in the difficulty of determining the resor- tance of both the quality and quantity which required to implement the policy. Therefore, we can take the conclusion that The Implementation of 4 in 1 (Four in One) System Policy still not running optimally, it caused by many factor of Edward III theory which has not fully supported the policy implementation process.*

### PENDAHULUAN

Kemacetan adalah masalah yang paling sering ditemui di kota-kota besar di Indonesia. Masalah ini biasanya timbul pada kota yang penduduknya lebih dari 2 juta jiwa seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Sebagai negara berkembang Indonesia melakukan pembangunan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan arah

pembangunan, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah yang timbul.

Kota Bandung merupakan salah satu kota di Indonesia yang penduduknya padat. Bandung yang lokasinya berada dekat dengan kota-kota besar seperti kota Bekasi, Jakarta, Depok dan Cimahi membuatnya strategis dalam perkembangan serta pertumbuhan ekonominya, sehingga Kota Bandung menawarkan berbagai pusat bisnis,

wisata, perdagangan, industri dan pendidikan. Hal ini tentu saja membuat Kota Bandung setiap weekday khususnya *weekend* selalu dipenuhi oleh wisatawan luar kota yang datang untuk berakhr pekan.

Kemacetan lalu lintas yang terjadi di daerah Pasteur Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pendeknya jarak antara pintu gerbang tol dengan perempatan Jl.Surya Sumantri, sehingga apabila terjadi lonjakan volume kendaraan dari dalam tol yang masuk menuju Kota Bandung akan berdampak sampai pada jalur pacu tol. Kemudian dari sisi lingkungan pun, kemacetan berdampak pada polusi yang semakin memburuk serta penggunaan Bahan Bakar Minyak yang berlebihan, serta banyaknya wisatawan luar kota yang datang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bandung, karena semakin banyaknya wisatawan yang datang serta aktifitas masyarakat pada satu kawasan maka bertambah pula volume kendaraan.

Kecepatan akses untuk mencapai Kota Bandung tentu menjadi prioritas pemerintah Bandung dalam berbagai bidang. Sarana transportasi yang memadai mutlak dibutuhkan untuk mendukung aktivitas dari masyarakatnya. Sebagai prasarana transportasi darat, gerbang tol merupakan tempat keluar masuknya kendaraan roda empat. Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat untuk menanggulangi kemacetan adalah dengan mengeluarkan kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*).

Landasan hukum Sistem 4 in 1 (*Four in One*) yaitu:

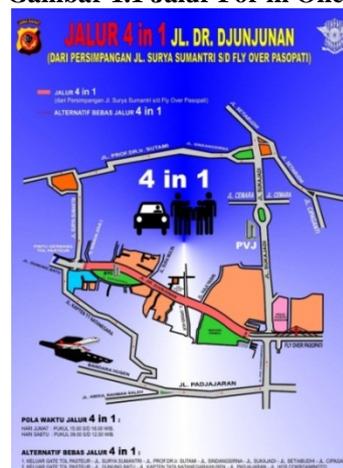
- Berdasarkan Pasal 37 ayat (3) huruf g dan Pasal 48 ayat 3 huruf a Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan telah diatur mengenai Pengendalian Lalu Lintas Pada Ruas Jalan dan atau Perlindungan Terhadap lingkungan serta Pembatasan Lalu Lintas Perseorangan Pada Koridor atau Kawasan Tertentu pada waktu dan jalan tertentu.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan jalan serta pengendalian pergerakan lalu lintas perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling sedikit 4 Orang Penumpang Bagi Kendaraan Bermotor Perseorangan Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu Di Kota Bandung.

Berdasarkan analisa kondisi arus lalu lintas di pintu keluar Tol Pasteur yang menuju Jl. Dr. Djunjunan pada hari-hari tertentu khususnya pada hari weekend dinilai sangat rawan kemacetan

sehingga berdampak signifikan terhadap penumpukan kendaraan, oleh karena itu dipandang perlu adanya upaya pengalihan arus lalu lintas yang masuk ke Kota Bandung guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Sistem 4 in 1 (*Four in One*) tercatat dalam **Kepwal No.551/Kep.582-Dishub/2013** tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 4 Orang Penumpang Bagi Kendaraan Bermotor Perseorangan Pada Ruas Jalan Tertentu di Kota Bandung. Dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas pada *weekend* dan pada akses masuk utama Kota Bandung. Jenis kendaraan yang harus mengikuti kebijakan 4 in 1(*Four in One*) terbatas pada kendaraan pribadi beroda empat, karena kendaraan beroda empatlah yang mendominasi arus kendaraan dan menyebabkan kemacetan.

**Gambar 1.1 Jalur For in One**



Sumber: TMC Satlantas Polrestabas Bandung, 2018

Di lihat dari gambar 1.1 jika ingin melewati Jalan Djunjunan tetapi kurang dari 4 penumpang dapat menggunakan jalur alternatif lain.

1. Keluar Gate Tol Pasteur - Jalan Surya Sumantri - Jalan Sutami - Jalan Sindangsirna - Jalan Setiabudhi - Jalan Cipaganti.

2. Keluar Gate Tol Pasteur - Jalan Gunung Batu - Jalan Kapten Tata Natanegara (Husein) - Jalan Pajajaran - Jalan HOS. Cokroaminoto (Pasirkaliki), atau menggunakan gerbang tol lain untuk akses keluar seperti gerbang tol Moh. Toha, Buah Batu, dan Pasirkoja.

Kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) awalnya dilakukan setiap Jumat pukul 15.00 hingga 18.00 WIB dan Sabtu pukul 09.00 hingga 12.00 WIB, namun setelah dilakukan evaluasi oleh Dinas Perhubungan dan Bina Marga akhirnya program ini hanya diberlakukan pada hari Sabtu dengan waktu yang lebih panjang yaitu sejak pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Program ini dilakukan pemerintah Bandung untuk melihat bagaimana dampak diterapkannya kebijakan ini sekaligus sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, pemerintah juga mengharapkan masyarakat pengguna kendaraan roda empat dapat menaati kebijakan tersebut.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) di Kota Bandung ini masih belum efektif, di karenakan mobil yang kurang dari empat orang penumpang itu justru lebih banyak pada saat weekday. Kemacetan menyergap kawasan Pasteur pada saat weekday, terjadi pukul 06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB serta pukul 15.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Serta pengguna kendaraan roda empat yang sengaja beralih melewati jalanan alternative setelah keluar dari tol Pasteur, karena mobil berisi kurang dari empat orang penumpang, akibatnya justru kemacetan beralih ke jalan alternative tersebut. Artinya, kebijakan ini bukannya mengurangi kemacetan dan mengurangi volume kendaraan, tetapi justru mengalihkan kemacetan dari arah keluar tol Pasteur menuju jalan alternative. Adapun teori yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah teori George. C. Edwards III yang dikenal dengan empat *Critical Factor* yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan komunikasi secara langsung atau tanya jawab dengan pihak-pihak sebagai informan dan mencatat serta merekam hasil dari wawancara tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) belum berjalan dengan baik. Dari ke empat faktor, implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) faktor komunikasi yang dilaksanakan kurang baik. Sementara jika di lihat dari faktor sumber daya belum memadai, kemudian faktor disposisi belum berjalan dengan baik dan faktor struktur birokrasi belum dikatakan baik juga.

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari ke empat faktor tersebut sangat berpengaruh dalam

keberlangsungan implementasi kebijakan 4 in 1 (*Four in One*).

1. Faktor Komunikasi masih ada beberapa yang belum dilakukan dengan baik, sehingga menyebabkan implementasi kebijakan berjalan dengan tidak baik. Meskipun dalam penyampaian informasi sudah dilakukan dengan baik, terbukti sistem 4 in 1 (*Four in One*) ini sudah mendapat respon positif dari para masyarakat dan petugas, isi kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) sudah jelas karena ketentuan-ketentuannya sudah diatur dalam **Keputusan Walikota No. 551 2013**, tetapi dalam konsistensi pemberian instruksi belum dikatakan baik, karena kebijakan hanya dilakukan pada saat perda diberlakukan saja penanganan dan pertanggung jawaban selanjutnya tidak ada. George C Edward berpendapat bahwa variabel komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian para pelaksana yang lebih tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat dan konsisten.
2. Faktor sumber daya jika dilihat dari sumber daya manusia dan sarana prasarana belum cukup memadai dan belum cukup baik, kurangnya para petugas dalam mengawasi kawasan 4 in 1 (*Four in One*) dan tidak adanya fasilitas fisik tambahan seperti tambahan plang pemberitahuan memasuki kawasan 4 in 1 (*Four in One*) sehingga dalam pelaksanaannya tidak optimal. George C. Edward III (2013:110) berpendapat bahwa diperlukan kecukupan staff dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. Sedangkan dalam variabel kewenangan George Edward III berpendapat bahwa kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik dan dalam variabel fasilitas George C. Edward III berpendapat bahwa fasilitas fisik penting dalam mengimplementasikan kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya

tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

3. Faktor Disposisi, belum berjalan dengan baik, seperti kurangnya pemahaman para petugas sebagai pelaksana dikatakan belum memahami keawal, karena sebagian besar anggota tidak mengetahui lengkap dan rinci yang ada pada Keputusan Walikota No. 551 tahun 2013. George C. Edward berpendapat bahwa sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi dan insentif adalah salahsatu cara yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif.
4. Faktor Struktur Birokrasi, belum dapat dikatakan baik. Kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) belum memiliki *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*), sistem 4 in 1 (*Four in One*) memakai Keputusan Walikota No. 551 tahun 2013 sebagai pedoman dasar pelaksanaan kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*). Sehingga kebijakan yang dilaksanakan menjadi tidak terarah dan tidak maksimal. George C. Edward berpendapat bahwa yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Procedures* (SOP) dan melaksanakan fragmentasi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) kendaraan roda empat dikawasan Pasteur, Kota Bandung, dapat disimpulkan bahwa kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) di Kota Bandung ini masih belum efektif, dikarenakan mobil yang kurang dari empat orang penumpang itu justru lebih banyak pada saat weekday. Kemacetan menyergap kawasan Pasteur pada saat weekday, terjadi pukul 06.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB serta pukul 15.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB.

Serta pengguna kendaraan roda empat yang sengaja beralih melewati jalanan alternative setelah keluar dari tol Pasteur. Akibatnya, justru kemacetan tersebut beralih ke jalan alternative tersebut yaitu Jalan Surya Sumantri, Jalan Sukajadi dan Jalan Gunung Batu.

Artinya, kebijakan ini bukannya mengurangi kemacetan dan mengurangi volume kendaraan, tetapi justru mengalihkan kemacetan dari arah keluar tol Pasteur menuju jalan alternative. Bahkan kemacetan terjadi saat sebelum dan setelah waktu 4 in 1 (*Four in One*) diberlakukan.

Karena kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) tidak efektif ini, maka jumlah pengguna kendaraan pun tidak berkurang, serta kemacetan tetap terjadi di bukan hanya pada saat keluar Tol Pasteur, tetapi juga teralokasi di jalanan alternative, serta sebelum dan setelah waktu 4 in 1 (*Four in One*).

### Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis mencoba memaparkan beberapa saran atau masukan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*), yaitu :

1. Kebijakan sistem 4 in 1 ini akan lebih efektif jika diberlakukan bukan hanya pada saat weekend saja tetapi diberlakukan juga pada saat weekday dengan jam tertentu, karena pada saat weekday para pengguna kendaraan roda empat lebih banyak dibanding pada saat weekend.
2. Perlu adanya pelatihan mengenai isi dari kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) yang diberikan kepada petugas dalam mengawasi kawasan 4 in 1 (*Four in One*) agar para petugas bisa lebih memahami isi kebijakan tersebut sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan 4 in 1 (*Four in One*) ini bisa lebih optimal dan tujuan yang diinginkan tercapai.
3. Kurangnya para petugas bisa diatasi dengan meningkatkan skill atau kemampuan para petugas dalam melaksanakan kebijakan dan fasilitas fisik yang mendukung dalam kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) bisa diatasi dengan menambah fasilitas baru, sehingga tujuan dari kebijakan sistem 4 in 1 (*Four in One*) ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis tidak akan mampu mengerjakan skripsi ini tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. R Widya Setiabudi Sumadinata, S.IP., M.T., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Wahyu Gunawan, M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bapak Dr. Drs. Slamet Usman Ismanto, M.Si., selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Program S-1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Penghargaan dan

penghormatan kepada Bapak Dr. Drs. H. Herijanto Bakti, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas nasehat, arahan dan bimbingan Bapak selama ini tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kebaikan Bapak digantikan dengan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT, Penghargaan dan penghormatan kepada Ibu Dr. Mas Halimah, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih atas nasehat, arahan dan bimbingan Ibu selama ini tentunya sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga kebaikan Ibu digantikan dengan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT, Ibu Dr. Dra. Hj. R. Ira Irawati, M.Si. Selaku Dosen Pembahas pada Seminar Usulan Penelitian. Terima kasih atas saran dan masukannya, Bapak Dr. M.D. Enjat Munajat, S.Si.,m.Ti. Selaku Dosen Pembahas pada Seminar Usulan Penelitian. Terima kasih atas saran dan masukannya. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama menempuh studi. Penulis juga mohon maaf apabila selama masa perkuliahan ada sikap dan perkataan penulis yang kurang berkenan. Seluruh staf Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran yang selalu membantu penulis dalam hal administrasi akademik. Terimakasih atas dukungan, bantuan serta informasi yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Kombes Pol Drs. Hendro Pandowo, M.Si Sebagai Kepala Polisi Polrestabes Bandung yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian di Polrestabes Bandung. Terima kasih atas kesediaan waktu serta pemberian data yang penulis butuhkan terkait dengan penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agustino, L. (Dasar-Dasar Kebijakan Publik). 2008. Bandung: Alfabeta.
- Moh, N. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D. R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono, P. D. (2004). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkislan, N. S. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Office dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Tangkislan, N. S. (2003). *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Balariung & Co.
- Toha, M. (2010). *Ilmu Administrasi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Wabah, S. A. (2002). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi*. Surabaya: Insan Cendekia .
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Suarabaya : Insan Cendekia.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.
- Yousa, A. (2007). *Kebijakan Publik , Teori dan Proses. Laboraturium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara*. Bandung: Fisip Universitas Padjadjaran.

### B. Sumber Lain

- <https://rinastkip.wordpress.com/2013/02/09/makalah-analisa-mengenai-kebijakan-3-in-1-dalam-mengatasi-kemacetan-lalu-lintas-di-dki-jakarta/>
- <http://jurnalonline.itenas.ac.id/index.php/rekayasahijau/article/viewFile/1199/1405>
- <http://bandung.bisnis.com/read/20130118/34242/297669/sistem-4-in-1-ini-jadwal-lengkap-pemberlakuannya-di-bandung>
- <https://jabar.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/10>
- <https://news.detik.com/jawabarat/2762377/aturan-4-in-1-atasi-macet-di-pasteur-bandung-tidak-efektif>
- <http://www.tribunnews.com/images/regional/view/355441/uji-coba-4-in-1-di-pasteur-bandung>
- <http://jabar.tribunnews.com/2013/03/08/4-in-1-terus-digulirkan-dorong-kepwal-segeraturun>
- <http://wiraprayatna.blogspot.co.id/2012/02/kebijakan-3-in-1-dlm-atasi-kemacetan.html>
- <http://ntmc-korlantaspolri.blogspot.com/2013/03/sistem-4-in-1-bandung-dipermanenkan.html>
- <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2014/11/29/306515/sistem-4-1-saat-akhir-pekan-di-pasteur-dinilai-tak-efektif>
- <https://news.okezone.com/read/2013/09/24/526/870887/ridwan-kamil-masih-kaji-kepwal-4-in-1-pasteur>
- <https://news.okezone.com/read/2013/01/27/526/752268/dprd-4-in-1-tidak-perlu-payung-hukum>

- 
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Bumi Aksara
- Tangkislan, Nogi. S. Hessel. 2003. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta : Balariung & Co.
- Winarno, budi. 2002. Teori an proses kebijakan publik. Jakarta : Erlangga.
- Nugroho d, riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Evaluasi. Jakarta: PT. Gramedia
- Widodo, Joko 2001, Good governance telaah dari dimensi akuntabilitas , kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah, insan cendekia, surabaya.
- Widodo, joko. 2011, analisis kebijakan publik, insan cendekia, surabaya.
- Sugiyono, prof. dr. 2004. Metode penelitian adminstrasi. bandung: alfabeta